



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Patimura No.6 Telp (0761) 22921 Fax. (0761) 23191
PEKANBARU - 28131

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



PEKANBARU, DESEMBER 2017

KATA PENGANTAR

Bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat serta nikmat dariNya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2018

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang kelautan dan perikanan.

Rencana Kerja Tahunan 2018 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah di tetapkan, sehingga dapat menjadi menjadi acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan Tahun 2018 yang dharapkan menjadi konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Atas nama seluruh jajaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Januari 2018

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau

Ir.H.HERMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630512 199303 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	
1	
1.2. Dasar Hukum	
2	
1.3. Maksud dan Tujuan	
5	
1.4. Sistematika Penulisan	
6	
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Dan Capaian Rensra OPD	
7	
2.2. Rencana Kerja Tahun 2018	
28	
BAB III. PENUTUP	
44	

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

2.1.	Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017	7
2.2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Sebelum dan Sesudah APBD Perubahan	8
2.3.	Program dan Kegiatan Serta Realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017	14
2.4.	Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai instansi teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2014– 2019, yang didalamnya mencakup periode tahunan. Pada Rencana Kinerja Tahunan ini akan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018, sekaligus juga memberikan gambaran tentang indikator kinerja beserta target - targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2014– 2019. Target kinerja di dalam rencana kinerja tahun 2018 ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk mencapainya dalam Tahun 2018 mendatang.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2014– 2019. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan dan kelautan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi .

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya tersebut mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan managerial dan tek nis dibidang sekretariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang pengolahan dan pemasaran hasil dan bidang kelautan dan pengawasan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang sekretariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang pengolahan dan pemasaran hasil dan bidang kelautan dan pengawasan.
3. Penyelenggaraan pemanfaatan dan evaluasi di bidang sekretariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang pengolahan dan pemasaran hasil dan bidang kelautan dan pengawasan
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan satu dokumen perencanaan yang berisikan rencana kinerja tahun 2018 yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau dan Renstra Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014– 2019 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018.

4.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
7. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi

-
- Perairan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan Tata Cara RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau
 23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Riau;
 25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
 26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
 27. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Riau;
 28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2018;

29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;

30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;

30.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penentuan keberhasilan kinerja Dinas kelautan dan Perikanan Tahun 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) inas kelautan dan Perikanan adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Tahun 2018.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja Tahunan (Renja) OPD yang mempunyai keselarasan rumusan dengan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Rencana Kineprja Tahunan (RKT), RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu :

-
1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
 2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2018.
 3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

3.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018.

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat tiga Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, dimana realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi Capaian Kinerja	
			2016	2017
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	111.762,02	90.378,08	110,080.73

2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	134.261,00	129.507,50	129,959.75
3. Meningkatnya Konsumsi Ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42	40,0	42,36
4. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	US \$	8.500.000	0	4.310.900
5. Meningkatnya Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Ha)	42	23.491,32	269.818,76
5. Persentase Menurunnya IUU Fishing	Persentase (%)	15 %	0	13,5 %

Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar diperoleh dari perikanan Budidaya. Total hasil produksi perikanan tahun 2017 sebanyak 240.040,48 ton merupakan hasil perikanan Budidaya sebesar 110.080,73 ton yang terdiri dari budidaya air tawar, payau, dan laut. Sedangkan 129.959,75 ton atau hasil perikanan tangkap di laut, danau dan sungai.

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Sebelum dan Sesudah APBD Perubahan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	
		Murni	Perubahan
		Rp	Rp
	TOTAL	36.840.729.400	27.884.874.743
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.912.950.000	3.107.089.468
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	819.839.468
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	247.500.000	259.800.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	107.800.000	107.800.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.000.000	145.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.500.000	55.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	554.055.000	554.055.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.495.000	44.495.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000	75.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	450.008.000	550.000.000
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	166.800.000	178.800.000
	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	283.800.000	283.800.000
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	884.150.000	2.985.349.875
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	558.650.000	257.650.000
	Pengadaan Meubeler	0	1.832.839.875
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	669.360.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	124.800.000	124.800.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.700.000	100.700.000
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	279.117.000	188.537.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	181.800.000	91.220.000
	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	97.317.000	97.317.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	500.000.000	500.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	500.000.000	500.000.000
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	783.318.000	833.318.000

	KINERJA DAN KEUANGAN		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	39.600.000	39.600.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	178.100.000	178.100.000
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	47.770.000	47.770.000
	Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD	148.948.000	198.948.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	121.000.000	121.000.000
	Audiovisual Dokumenter Pembangunan	247.900.000	247.900.000
VI	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	285.967.000	285.967.000
	Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	285.967.000	285.967.000
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	672.485.000	672.485.000
	Penyusunan Pencadangan Kawasan Konservasi	284.355.000	284.355.000
	Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	388.130.000	388.130.000
VIII	PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	2.981.497.000	2.981.497.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan serta Penilaian POKMASWAS	328.148.000	328.148.000
	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	763.000.000	763.000.000
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	379.082.000	379.082.000
	Pembangunan Pos Pengawas	200.000.000	200.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	1.311.267.000	1.311.267.000
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	0	0

IX	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	18.296.785.400	8.324.411.400
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	196.610.000	196.610.000
	Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar	782.164.000	0
	Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan	170.000.000	170.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	530.000.000	501.258.000
	Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang Mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi	1.721.227.400	1.496.969.400
	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	427.470.000	427.470.000
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	9.087.210.000	0
	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB	230.254.000	230.254.000
	Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan	500.000.000	500.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja UPTD Se-Provinsi Riau	400.000.000	400.000.000
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan	291.450.000	291.450.000
	Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan	242.130.000	242.130.000
	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	1.450.000.000	1.450.000.000
	Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	368.270.000	368.270.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Pembenihan (DAK)	1.900.000.000	1.900.000.000
	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018	0	150.000.000
X	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.165.610.000	2.713.530.000

	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	275.675.000	373.595.000
	Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap	200.000.000	200.000.000
	Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	456.975.000	906.975.000
	Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodelan Perikanan Tangkap	463.290.000	463.290.000
	Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP	294.850.000	294.850.000
	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	474.820.000	474.820.000
XI	OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	2.888.050.000	2.938.050.000
	Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM terbaik se Provinsi Riau	270.000.000	270.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP Prov Riau	433.720.000	483.720.000
	Pengembangan Nilai Produk Pengelolaan Hasil Perikanan	350.000.000	350.000.000
	Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dengan Pengusaha Pemasaran	200.000.000	200.000.000
	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	200.000.000	200.000.000
	Pameran Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	500.000.000	500.000.000
	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	725.330.000	725.330.000
	Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik dan Cetak	209.000.000	209.000.000
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN	4.190.800.000	2.354.640.000

	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	400.000.000	400.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	2.500.000.000	2.500.000.000
	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	1.290.800.000	1.290.800.000

Berdasarkan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 secara tugas dan fungsinya terdiri dari 12 program, secara rinci hasil kegiatan pada pelaksanaan APBD murni pada tahun 2017 belanja langsung sebesar Rp. 36.840.729.400 dan pada APBD-P perubahan menjadi Rp. 27.884.874.743 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2017 terealisasi sebesar Rp. 23.723.069.395,00 atau sebesar 85,08% dan untuk realisasi fisik 93,42%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% hal ini disebabkan karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat kegiatan, sisa honor, sisa kontrak pengadaan dan tidak dilaksanakannya FGD karena tidak cukupnya waktu untuk dilaksanakan. Pada anggaran belanja tidak Langsung APBD murni sebesar Rp. 28.404.989.144,00 pada APBD-P sebesar Rp.19.654.729.144,00.

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Serta Realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017					
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi 2017		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7= 6/5X100%	
	Non Urusan									
	NON URUSAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertib administrasi dan informasi	12 bulan	35.000.000	12	33.000.000	12	20.850,000	100,00	63,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang Waktu Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik	60 Bulan	680.400.000	12	819.839.468	12	625.540,000	100,00	76,30
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan jasa	60 Bulan	250.000.000	12	259.800.000	12	230.540,000	100,00	88,74

RKT Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 20188

		Kebersihan Kantor								
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	50.000.000	12	107.800.000	12	94.960,000	100,00	88,09
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rentang waktu Penyediaan Barang dan Penggandaan	20 lembar	60.850.000	12	145.000.000	12	104.820,000	100,00	72,29
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	160 paket	25.000.000	40	55.500.000	40	55.350,000	100,00	99,73
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 Unit	196.500.000	5	554.055.000	5	462.620,000	100,00	83,50
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undang an	Rentang Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an	8 eksemplar	25.000.000	10	44.495.000	10	19.550,000	100,00	43,94
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.902 orang	130.000.000	390	75.000.000	390	59.800,000	100,00	79,73
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekwensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	500.000.000	12	450.000.000	12	531.740,000	100,00	118,16
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	60 bulan	165.600.000	12	178.800.000	12	178.800,000	100,00	100,00

	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang Waktu Layanan Informasi Kegiatan Pembangunan Perikanan	2 edisi	50.000.000	2	283.800.000	2	225.220,000	100,00	79,36
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	6 unit	711.000.000	3	257.650.000	3	255.740,000	100,00	99,26
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler yang Tersedia	0 Unit	-	1306	1.832.839.875	1.306	1.733.150,000	100,00	94,56
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	2 unit	87.450.000	1	569.360.000	1	622.780,000	100,00	109,38
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Beroperasi yang diperihara	11 Unit	85.600.000	11	124.800.000	11	79.350,000	100,00	63,58
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	100.000.000	1	100.700.000	1	82.650,000	100,00	82,08
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah ASN yang memperoleh pakaian khusus hari-hari tertentu	145 orang	150.000.000	140	91.220.000	0	-	0,00	0,00

	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Rentang waktu pembinaan fisik dan Mental Aparatur yang dilaksanakan	140 orang	37.400.000	140	97.317.000	140	87.010,000	100,00	89,41
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 orang	950.000.000	1	500.000.000	1	282.020,000	100,00	56,40
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	6 dokumen	61.000.000	6	39.600.000	6	17.050,000	100,00	43,06
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan	20 laporan	200.000.000	1	178.100.000	1	169.680,000	100,00	95,27
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	1 dokumen	93.000.000	1	47.770.000	1	36.160,000	100,00	75,70

	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah laporan (dokumen)	1 Kab/Kota	105.290.000	12	198.948.000	12	176.860,000	100,00	88,90
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi (Dokumen dan Frekuensi Monev)	12 Kab/Kota	298.700.000	12	121.000.000	12	84.480,000	100,00	69,82
	Supervisi dan statistik	Jumlah laporan	1 Kab/Kota	50.000.000	12	247.900.000	12	167.020,000	100,00	67,37
	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan (orang)		-				-		
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG									
6	Program Perencanaan Tata Ruang									
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah RANPERDA pengelolaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1 dokumen	3.000.000.000	1	285.967.000	1	152.880,000	100,00	53,46
	URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR									
	LINGKUNGAN HIDUP									

7	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam									
	Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi	Luas potensi pecadangan kawasan konservasi perairan daerah/ KKPD	0 ha	-	1	284.355.000	1	210.670,000	100,00	74,09
	Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Luas kawasan ekosistem mangrove pesisir yang mengalami kerusakan/ degradasi dapat dipulihkan	50 ha	3.300.000.000	1	388.130.000	1	355.070,000	100,00	91,48
	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Jumlah Kawasan (Ha)		-				-		
	URUSAN PILIHAN									
	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
8	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut									

	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	Jumlah POKMASWAS yang dibina dan dinilai	30	Kab/Kota	100.000.000	11	328.148.000	11	254.470,000	100,00	77,55
	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	Jumlah gelar operasi dan pengawasan terpadu	14	Kab/Kota	316.000.000	11	763.000.000	11	655.330,000	100,00	85,89
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah kapal yang dipelihara	1	Kab/Kota	256.330.000	1	379.082.000	1	365.350,000	100,00	96,38
	Pembangunan Pos Pengawas	Jumlah Pos Pengawas yang dibangun	2	Kab/Kota	800.000.000	2	200.000.000	2	193.600,000	100,00	96,80
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (DAK)	Terlaksananya program DAK fisik tahun anggaran 2017	0	Kab/Kota	-	6	1.311.267.000	6	1.222.780,000	100,00	93,25
	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah kapal yang dipelihara			-				-		
9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan										

	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Ketersediaan Benih Kakap Putih, Benur Udang, Calon Induk Udang, Calon Induk Kakap Putih	25.00 0 ekor	200.000.000	100 0	196.610.000	1.0 00	129.010,000	100,00	65,62
	Revitalisasi kawasan budidaya air laut, payau dan tawar	Jumlah luas kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi	2 ha	500.000.000	20	0	0	-	0,00	0,00
	Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan	Jumlah petugas laboratorium yang terampil	0 orang	-	3	170.000.000	3	167.060,000	100,00	98,27
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembenihan Air Payau dan Laut	2 lokasi	263.470.000	2	530.000.000	2	469.670,000	100,00	88,62
	Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi	Ditemukannya teknologi pembenihan ikan langka/ lokal yang mempunyai nilai ekonomi tinggi	12 Komoditas	500.000.000	4	1.721.227.400	4	1.406.090,000	100,00	81,69
	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (CBIB)	50 orang	200.000.000	410	427.470.000	410	420.260,000	100,00	98,31

	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB	Jumlah pembudidaya penerima PUMP - PB yang terverifikasi	262 pokdakan	932.000.000	172	230.254.000	172	226.490,000	100,00	98,37
	Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Jumlah POKDAKAN yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan serta jumlah penyakit ikan yang dapat dikendalikan	15 orang	100.000.000	8	500.000.000	8	417.150,000	100,00	83,43
	Peringkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja UPTD Se-Provinsi Riau	Jumlah peserta bimtek untuk mendukung pelayanan dan kinerja UPTD Pembenihan Provinsi Riau	12 Kab/Kota	500.000.000	1	400.000.000	1	352.670,000	100,00	88,17
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan	Jumlah pembenih ikan yang dibina dan bersertifikat	12 Kab/Kota	350.000.000	30	291.450.000	30	247.260,000	100,00	84,84
	Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan	Jumlah Pokdakan yang memanfaatkan prasarana dan sarana budidaya	12 Pokdakan	528.000.000	40	242.130.000	40	237.330,000	100,00	98,02
	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	Jumlah pelayanan UPT Pembenihan dalam menunjang produksi benih	2 ekor	637.000.000	5000000	1.450.000.000	5000000	984.670,000	100,00	67,91

	Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau		0 izin	-	150	368.270.000	150	256.380,000	100,00	69,62
	Identifikasi Dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018	Jumlah kelompok yang teridentifikasi dan terverifikasi calon penerima hibah 2018 (Kelompok)	0 Kelompok	-	21	150.000.000	0	-	0,00	0,00
	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan	Jumlah Kelompok Yang Dibina		-				-		
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya		-				-		
10	Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
	Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan tanjung samak	Layanan pelabuhan perikanan	1 dokumen	187.520.000	1	373.595.000	1	373.600,000	100,00	100,00
	Pembinaan dan operasional Forum KUB Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang dibina	12 Forum KUB	500.000.000	12	200.000.000	12	174.230,000	100,00	87,12

	Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	Jumlah Populasi ikan yang disebar di perairan umum daratan	3 lokasi	600.000.000	2	456.975.000	2	811.680,000	100,00	177,62
	Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang melakukan pengembangan usaha perikanan tangkap melalui investasi permodalan	0 orang	-	30	463.290.000	30	366.240,000	100,00	79,05
	Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP	Jumlah nelayan yang terlibat dalam pengelolaan perairan teritorial	2 wpp	300.000.000	1	294.850.000	1	230.190,000	100,00	78,07
	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan	50 izin	150.000.000	150	474.820.000	150	415.500,000	100,00	87,51
	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Jumlah Kapal dan Alat Tangkap		-				-		
	Percepatan Kartu Nelayan	Jumlah Nelayan yang Memiliki Kartu Nelayan		-				-		
11	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	-								
	Lomba dan Penilaian Unit Penilaian Ikan (UPI)	Jumlah UMKM yang dinilai	12 UMKM	97.000.000	3	270.000.000	3	260.610,000	100,00	96,52

RKT Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 201818

	dan UMKM terbaik se Provinsi Riau									
	Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP Prov Riau	Dokumen Operasional LPPMHP	12 paket	950.000.000	1	483.720.000	1	476.530,000	100,00	98,51
	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil	60 orang	75.000.000	50	350.000.000	50	297.960,000	100,00	85,13
	Pendampingan Usaha UMKM Penlahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran	Jumlah kesepakatan kerjasama antara UMKM dengan pengusaha pemasaran (MOU)	3 MOU	230.000.000	1	200.000.000	1	186.200,000	100,00	93,10
	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Penlahan Hasil Perikanan	Jumlah usulan penerbitan sertifikat dari kab/kota	5 sertifikat	150.000.000	1	200.000.000	1	176.330,000	100,00	88,17
	Pameran/Bazar Produk Penlahan Hasil Perikanan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/ bazar produksi pengolahan hasil perikanan	3 kali	400.000.000	6	500.000.000	6	477.090,000	100,00	95,42
	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Inovasi Menu Serba Ikan	36 menu	500.000.000	40	725.330.000	0	-	0,00	0,00
	Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media	Jumlah sosialisasi GEMARIKAN	6 orang	450.000.000	400	209.000.000	400	202.290,000	100,00	96,79

RKT Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 201819

	Elektronik dan Cetak									
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Jeni Sarana		-				-		
	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah Sosialisasi Gemarikan (Kali)		-				-		
	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Binaan Jenis dan Pengawasan		-				-		
	Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sarana yang diuji		-				-		
	Peningkatan Pelayanan UPT.PMHP	Jumlah Sarana UPT yang dibangun		-				-		
	Pembinaan Produk Perikanan NonKonsumsi	Jumlah Binaan Jenis Produk Perikanan		-				-		
12	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan	Mendukung Fungsionalisasi sarana dan prasarana kegiatan pelatihan di 2 (dua) Lokasi, BAT Rumbai dan BAP Sei Suir Selat Panjang								
	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan	Jumlah petambak yang terlatih	50 kab/kota	493.360.000	7	400.000.000	7	379.140,000	100,00	94,79

RKT Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 201820

	Budidaya Air Payau									
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Jumlah sarana dan prasarana UPT Pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan	1 unit	423.090.000	2	960.840.000	2	612.990,000	100,00	63,80
	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana produksi pelayanan kinerja UPT Pelatihan	4 paket	563.500	1	1.290.800.000	1	1.023.460,000	100,00	79,29
13	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan									
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pendamping Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok BP3K Berstatus Madya		-				-		

2.2. Rencana Kerja Tahun 2018

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 secara tugas dan fungsinya terdiri dari 12 program dengan 50 kegiatan pada pelaksanaan APBD pada Tahun 2018 belanja langsung sebesar Rp. 39.996.123.000, secara rinci program dan kegiatan Tahun 2018 yaitu:

1. Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan perikanan dan kelautan
- Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan perikanan dan kelautan
- Indikator Sasaran : Pelayanan administrasi, ATK dan jasa telekomunikasi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.283.350.000
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rentang Waktu jasa penyediaan Jasa Komunikasi,air dan listrik	Pekanbaru	12 Bulan	680.400.000
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	12 Bulan	250.000.000
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rentang waktu Penyediaan alat tulis kantor	Pekanbaru	12 Bulan	50.000.000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rentang waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekanbaru	12 Bulan	80.000.000
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rentang waktu pelayanan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Pekanbaru	12 Bulan	25.000.000

6	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rentang waktu perlengkapan kantor		12 Bulan	196.500.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rentang waktu Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Pekanbaru	12 Bulan	25.000.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Pekanbaru	4800	160.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pekanbaru	75 kali	600.850.000
10	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Pekanbaru	6 orang	165.600.000
11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah sosialisasi, informasi dan publikasi	pekanbaru	2 kali	50.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.373.050.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di kantor	Pekanbaru	30	2.187.450.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	Pekanbaru	11	85.600.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	6	100.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				37.400.000
1	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Rentang waktu Pembinaan Fisik dan mental aparatur	Pekanbaru	140	37.400.000

IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				973.586.600
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi (Dokumen dan Frekuensi Monev)	Pekanbaru	12 dan 30	272.808.000
2	Supervisi dan Statistik	Jumlah analisis laporan	Pekanbaru	1	490.778.600
3	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan keuangan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	Pekanbaru	9	210.000.000

2. Tujuan : Meningkatkan Produksi Perikanan yang berkelanjutan
- Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan
- Indikator Sasaran : Jumlah produksi perikanan (ton) = 261.208,30
Jumlah Nilai Tukar Nelayan (NTN) = 105,10

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				8.942.294.400,00
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah calon induk ikan unggul	UPT. Budidaya Perikanan	25000 ekor benih	350.000.000,00
2	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	Provinsi Riau	20 orang	94.504.800,00

3	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (CBIB)	Provinsi Riau	40 sertifikat, 10 auditor	188.970.600,00
4	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasana untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Dumai dan Meranti	25 paket	5.900.726.460,00
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Budidaya Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana dalam menunjang operasinya UPT	Provinsi Riau	2 paket	1.778.502.540,00
6	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Budidaya Perikanan	Rentang waktu pelayanan UPT. Budidaya Perikanan	Provinsi Riau	2 paket	629.590.000,00
IX	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				11.334.337.300,00
1	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	Rentang waktu Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	1 Tahun	184.863.000,00
2	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap Ikan	Jumlah Kapal dan Alat Tangkap Ikan untuk Masyarakat Nelayan	Provinsi Riau	79 unit	10.379.018.000,00
3	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	12 Kab/kota	50 izin dan 30 unit kapal yang terfasilitasi dokumen	281.395.500
4	Percepatan Kartu Nelayan	Jumlah Nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	12 Kab/kota	4600 nelayan	339.060.800
5	Pengelolaan Perairan Teritorial di	Jumlah dokumen WPP	Provinsi Riau	1 dokumen	150.000.000

	WPP				
XI	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan				1.451.150.300,00
1	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	Jumlah Petambak yang terampil	Provinsi Riau	35	469.932.300,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Jumlah sarana dan prasana yang mendukung operasional UPT	Provinsi Riau	1 Tahun	420.814.000,00
3	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Rentang waktu Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Provinsi Riau	1 Tahun	560.404.000,00
XII	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan				184.493.200,00
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembinaan Penyuluh dan pendamping dalam mendukung pengembangan kelautan dan perikanan	Provinsi Riau	13 orang	184.493.200,00

3. Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Produk Pengolahan
- Sasaran : Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan Di Provinsi Riau
- Indikator Sasaran : Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan
Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun 42,18
Nilai Ekspor (Usd) 8.800.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/Prog ram Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
X	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				3.693.876.800
1	Pengembang an Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil	Kab.Roka n Hulu ,Pekanbar u	60 orang	71.586.000
2	Pengembang an Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan	Jumlah Kelompok Perikanan yang menerapkan Sistem Rantai Dingin	Bengkalis ,Dumai,R okan Hilir	12 unit	1.089.728.600
3	Pembinaan dan pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sertifikat yang diberikan bagi UMKM pengolahan hasil perikanan	5 kab/kota	5 usulan sertifikat	140.144.000
4	Pameran/Baza r Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/baza r produk pengolahan hasil perikanan	Pekanbar u,Batam, Surabaya	3 kali	385.419.000,00
5	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Inovasi Menu Serba Ikan	12 Kab/kota	36 menu	474.538.000,00
6	Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se-Provinsi Riau	Jumlah UMKM yang dinilai	12 kab/kota	12 UMKM	89.755.000,00
7	Gerakan Memasyarakat kan Makan Ikan	Jumlah Pembinaan Gemarikan	pekanbar u	4 kali	384.946.000,00

8	Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi	Jumlah pengolah hasil produk non konsumsi yang terampil	Pekanbaru	25 orang	242.504.200,00
9	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah UPI yang dibina	12 Kab/kota	12 UPI(UMKM)	73.002.000,00
10	Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah sampel yang di uji	Provinsi Riau	sertifikat akreditasi 24 SDM	545.942.000,00
11	Peningkatan Pelayanan UPT.PMHP	Rentang waktu pelayanan PM2HP	UPT.PM2 HP Dumai	6 Persone;	196.312.000,00

4. Tujuan : Terlaksananya Konservasi Di Kawasan Perairan Daerah

Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan SDKP Yang Partisipatif, Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Indikator Sasaran : Luas Kawasan Konservasi (Ha) 50

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V	Program Perencanaan Tata Ruang				400.000.000,00
1	Penyusunan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen yang di hasilkan	Provinsi Riau	1	400.000.000,00
VI	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam				880.526.200,00

1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Luas kawasan ekosistem pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat dipulihkan	Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Meranti, Kab. Indragiri Hilir	50 ha	880.526.200,00
---	---------------------------------------	--	---	-------	----------------

5. Tujuan : Meningkatkan Potensi/Daya Dukung Perairan
 Sasaran : Meningkatnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan laut
 Indikator Sasaran : Menurunnya Tingkat Illegal Fishing (IUU) (61 Kasus)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VII	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Laut				7.442.058.200,00
1	Pembinaan dan Pemberdayaan serta Penilaian POKMASWAS	Jumlah POKMASWAS yang dibina dan dinilai	11 kab/kota	7	91.901.000,00
2	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	Jumlah gelar operasi dan pengawasan terpadu	7 kab/kota	3	550.706.400,00
3	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah Kapal Yang di Pelihara (Unit)	7 kab/kota	3 Unit	604.301.800,00
4	Pembangunan Speed Boat Pengawas dan Perlengkapan POKMASWAS (DAK)	Jumlah speed boat pengawas dan perlengkapan	Provinsi Riau	2 Unit	6.195.149.000,00

Tabel 2.4.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.283.350.000	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rentang Waktu jasa penyediaan Jasa Komunikasi,air dan listrik	Pekanbaru	12 Bulan	680.400.000	Sekretariat
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	12 Bulan	250.000.000	Sekretariat
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rentang waktu Penyediaan alat tulis kantor	Pekanbaru	12 Bulan	50.000.000	Sekretariat
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rentang waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekanbaru	12 Bulan	80.000.000	Sekretariat

5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rentang waktu pelayanan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Pekanbaru	12 Bulan	25.000.000	Sekretariat
6	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rentang waktu perlengkapan kantor	Pekanbaru	12 Bulan	196.500.000	Sekretariat
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rentang waktu Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Pekanbaru	12 Bulan	25.000.000	Sekretariat
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Pekanbaru	4800	160.000.000	Sekretariat
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pekanbaru	75 kali	600.850.000	Sekretariat
10	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Pekanbaru	6 orang	165.600.000	Sekretariat
11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah sosialisasi, informasi dan publikasi	pekanbaru	2 kali	50.000.000	Sekretariat

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.373.050.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di kantor	Pekanbaru	30	2.187.450.000	Sekretariat
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	Pekanbaru	11	85.600.000	Sekretariat
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	6	100.000.000	Sekretariat
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				37.400.000	
1	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Rentang waktu Pembinaan Fisik dan mental aparatur	Pekanbaru	140	37.400.000	Sekretariat
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				973.586.600	
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi (Dokumen dan Frekuensi Monev)	Pekanbaru	12 dan 30	272.808.000	Sekretariat
2	Supervisi dan Statistik	Jumlah analisis laporan	Pekanbaru	1	490.778.600	Sekretariat

3	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan keuangan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	Pekanbaru	9	210.000.000	Sekretariat
V	Program Perencanaan Tata Ruang				400.000.000,00	
1	Penyusunan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen yang di hasilkan	Provinsi Riau	1	400.000.000,00	Kelautan dan Pengawasan
VI	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam				880.526.200,00	
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Luas kawasan ekosistem pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat di pulihkan	Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Meranti, Kab. Indragiri Hilir	50 ha	880.526.200,00	Kelautan dan Pengawasan
VII	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut				7.442.058.200,00	
1	Pembinaan dan Pemberdayaan serta Penilaian POKMASWAS	Jumlah POKMASWAS yang dibina dan dinilai	11 kab/kota	7	91.901.000,00	Bidang Kelautan dan Pengawasan
2	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	Jumlah gelar operasi dan pengawasan terpadu	7 kab/kota	3	550.706.400,00	Bidang Kelautan dan Pengawasan
3	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah Kapal Yang di Pelihara (Unit)	7 kab/kota	3 Unit	604.301.800,00	Bidang Kelautan dan Pengawasan

4	Pembangunan Speed Boat Pengawas dan Perlengkapan POKMASWAS (DAK)	Jumlah speed boat pengawas dan perlengkapan	Provinsi Riau	2 Unit	6.195.149.000,00	Kelautan dan Pengawasan
VIII	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				8.942.294.400,00	
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah calon induk ikan unggul	UPT.Budidaya Perikanan	25000 ekor benih	350.000.000,00	UPT.Budiya Perikanan
2	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	Provinsi Riau	20 orang	94.504.800,00	Bidang Budidaya
3	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (CBIB)	Provinsi Riau	40 sertifikat,10 auditor	188.970.600,00	Bidang Budidaya
4	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasana untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	Rokan Hilir,Indragiri Hilir,dumai dan Meranti	25 paket	5.900.726.460,00	UPT.Budidaya Perikanan
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Budidaya Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana dalam menunjang operasinya UPT	Provinsi Riau	2 paket	1.778.502.540,00	UPT.Budidaya Perikanan

6	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Budidaya Perikanan	Rentang waktu pelayanan UPT. Budidaya Perikanan	Provinsi Riau	2 paket	629.590.000,00	UPT. Budidaya Perikanan
IX	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				11.334.337.300,00	
1	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	Rentang waktu Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	1 Tahun	184.863.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak
2	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap Ikan	Jumlah Kapal dan Alat Tangkap Ikan untuk Masyarakat Nelayan	Provinsi Riau	79 unit	10.379.018.000,00	Bidang Tangkap
3	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	12 Kab/kota	50 izin dan 30 unit kapal yang terfasilitasi dokumen	281.395.500	Bidang Tangkap
4	Percepatan Kartu Nelayan	Jumlah Nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	12 Kab/kota	4600 nelayan	339.060.800	Bidang Tangkap
5	Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP	Jumlah dokumen WPP	Provinsi Riau	1 dokumen	150.000.000	Bidang Tangkap
X	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				3.693.876.800	

1	Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil	Kab.Rokan Hulu ,Pekanbaru	60 orang	71.586.000	Bidang P2HKP
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan	Jumlah Kelompok Perikanan yang menerapkan Sistem Rantai Dingin	Bengkalis,Dumai,Rokan Hilir	12 unit	1.089.728.600	Bidang P2HKP
3	Pembinaan dan pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sertifikat yang diberikan bagi UMKM pengolahan hasil perikanan	5 kab/kota	5 usulan sertifikat	140.144.000	Bidang P2HKP
4	Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/bazar produk pengolahan hasil perikanan	Pekanbaru,Batam,Surabaya	3 kali	385.419.000,00	Bidang P2HKP
5	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Inovasi Menu Serba Ikan	12 Kab/kota	36 menu	474.538.000,00	Bidang P2HKP
6	Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se-Provinsi Riau	Jumlah UMKM yang dinilai	12 kab/kota	12 UMKM	89.755.000,00	Bidang P2HKP
7	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah Pembinaan Gemarikan	pekanbaru	4 kali	384.946.000,00	Bidang P2HKP
8	Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi	Jumlah pengolah hasil produk non konsumsi yang terampil	Pekanbaru	25 orang	242.504.200,00	Bidang P2HKP
9	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah UPI yang dibina	12 Kab/kota	12 UPI(UMKM)	73.002.000,00	Bidang P2HKP
10	Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah sampel yang di uji	Provinsi Riau	sertifikat akreditasi 24 SDM	545.942.000,00	UPT.PMHP

11	Peningkatan Pelayanan UPT.PMHP	Rentang waktu pelayanan PM2HP	UPT.PM2HP Dumai	6 Persone;	196.312.000,00	UPT.PMHP
XI	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan				1.451.150.300,00	
1	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	Jumlah Petambak yang terampil	Provinsi Riau	35	469.932.300,00	-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Jumlah sarana dan prasana yang mendukung operasional UPT	Provinsi Riau	1 Tahun	420.814.000,00	-
3	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Rentang waktu Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Provinsi Riau	1 Tahun	560.404.000,00	-
XII	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan				184.493.200,00	
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembinaan Penyuluh dan pendamping dalam mendukung pengembangan kelautan dan perikanan	Provinsi Riau	13 orang	184.493.200,00	Bidang Budidaya
					39.996.123.000,00	

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 ini merupakan mediasi untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional sehingga dapat membantu pencapaian pelaksanaan program. Dan juga dapat menjadi suatu performance agreement sehingga memudahkan proses pengukuran kinerja, dapat membantu untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan, serta dapat membantu menetapkan kinerja periode berikutnya.

Rencana Kinerja Tahunan berupa dokumen yang berisi informasi Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahun tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dengan maksud sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2018. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.